



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No.1 Agustus 2025 h. 121-134

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1090>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan Karir)

Angraini Monica Putri, Elza Qorina Pangesti

Universitas Widya Mataram

Angmonica101putri@gmail.com, elzaqorina20@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 12-02-2025

Revised : 08-06-2025

Accepted : 21-08-2025

Humans are created as social creatures, and need others to sail the ark of life. One way to navigate life is to go through marriage. This study aims to analyze the policies of the Sleman Regency Regional Government in encouraging family welfare, focusing on the concept of the sakinah family in career couples. The phenomenon of increasing the number of career families poses challenges in maintaining household harmony in the midst of busy work. This type of research is sociological law (juridical-empirical). The case study approach is used to provide a holistic and in-depth understanding of the specific phenomena that occur at the research site. The results of the study show that local governments have implemented various policies and programs that support the realization of family welfare, including through the development of the Sakinah family, economic empowerment, religious activities, and community institutional support. However, career couples still face obstacles in the form of limited interaction time, women's double burden, and the influence of the modern social environment. Nevertheless, the application of religious values, openness, mutual respect, honesty, and gratitude have proven to be the main factors that strengthen the concept of the sakinah family in the career family. This research emphasizes that collaboration between regional policies and the resilience of community religious values is the key to realizing a prosperous sakinah family in Sleman Regency.

Keywords: Local Government Policy; Family Welfare; Sakinah Family; Career Couples;

Abstrak

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dan membutuhkan orang lain dalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu cara mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mendorong kesejahteraan keluarga, dengan fokus pada konsep keluarga sakinah pada pasangan karir. Fenomena meningkatnya jumlah keluarga karir menimbulkan tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah kesibukan pekerjaan. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis (yuridis-empiris). Pendekatan studi kasus digunakan untuk memberikan pemahaman holistik dan mendalam terhadap fenomena spesifik yang terjadi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai kebijakan dan program yang mendukung terwujudnya kesejahteraan keluarga, antara lain melalui pembinaan keluarga sakinah, pemberdayaan ekonomi, kegiatan keagamaan, serta dukungan kelembagaan masyarakat. Namun, pasangan karir masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu interaksi, beban ganda perempuan, dan pengaruh lingkungan sosial modern. Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai agama, sikap keterbukaan, saling menghargai, kejujuran, serta rasa syukur terbukti menjadi faktor utama yang memperkuat konsep keluarga sakinah pada keluarga karir. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara kebijakan daerah dan ketahanan nilai religius masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sejahtera di Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah; Kesejahteraan Keluarga; Keluarga Sakinah; Pasangan Karir;

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, nilai, dan karakter setiap individu. Dalam keluarga, anak memperoleh pendidikan pertama yang bersifat informal, baik melalui pola asuh, teladan, maupun interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, keluarga sering disebut sebagai lingkungan pendidikan utama dan pertama sebelum anak mengenal pendidikan formal di sekolah maupun pengaruh lingkungan sosial yang lebih luas. Selain berfungsi sebagai tempat

lahir dan berkembangnya individu, keluarga juga memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anggotanya. Kesejahteraan, keharmonisan, serta kualitas komunikasi dalam keluarga menjadi faktor penting yang menentukan tumbuh kembang anggota keluarga, terutama anak. Namun, di era modern saat ini, keluarga menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan pola hidup, tuntutan ekonomi, kesibukan orang tua, hingga pengaruh teknologi dan lingkungan luar. Kondisi tersebut seringkali berdampak pada fungsi keluarga, baik dalam aspek pengasuhan, pendidikan, maupun pembentukan karakter. Apabila keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka dapat memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan moral anggota keluarganya. (Kawengian et al., 2022)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi fundamental dalam membentuk ketahanan sosial, moral, dan spiritual. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi utama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang. Pernikahan, sebagai pintu pembentukan keluarga, dipandang sebagai sunnatullah sekaligus sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk melanjutkan keturunan, melainkan juga untuk mewujudkan ketenangan hidup (*litaskunu*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmah (kasih sayang yang luas) (Riyono, 2022). Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah diidealkan sebagai keluarga yang harmonis, saling menghormati, serta senantiasa menegakkan nilai-nilai agama (Sajaruddin, 2022). Keluarga merupakan unit sosial terkecil sekaligus pondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan karir di Kabupaten Sleman berupaya membangun keluarga sakinah dengan menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan peran dalam rumah tangga. Nilai-nilai keluarga sakinah, seperti kasih sayang, saling menghormati, komunikasi harmonis, serta pembagian peran yang adil, menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga di tengah dinamika kehidupan modern (Fatimaningsih, n.d.)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara sah, baik menurut hukum agama, adat, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sosial, perkawinan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga yang memiliki nilai, budaya, dan latar belakang berbeda. Oleh sebab itu, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya berorientasi pada hubungan lahiriah, tetapi juga spiritual, sehingga keberlangsungannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera. Namun demikian, realitas perkawinan di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan gaya hidup, tuntutan ekonomi, serta dinamika sosial sering kali memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Perbedaan pandangan, tekanan pekerjaan, hingga persoalan komunikasi dapat menjadi faktor pemicu konflik dalam perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, kedewasaan, dan kesiapan mental yang matang agar perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan mulia.

Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sekadar ikatan formal, melainkan sebuah proses panjang dalam membangun kebersamaan, saling memahami, serta bekerja sama dalam menghadapi dinamika kehidupan. Apabila dijalani dengan niat yang lurus dan

berlandaskan nilai-nilai agama, perkawinan dapat menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. (Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, 2021)

Dalam konteks masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang dari sisi agama tetapi juga harus memenuhi legalitas negara. Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat syariat serta tercatat dalam administrasi negara, sehingga pasangan suami istri beserta anak-anaknya memperoleh kepastian hukum (Maimun, 2022) ini memberikan rasa aman dan perlindungan bagi keluarga, yang pada akhirnya memperkuat kesejahteraan rumah tangga. Dengan demikian, terbentuklah sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam menopang ketahanan keluarga. (Musyafah, 2020). Perkawinan dianggap sebagai fondasi utama dalam pembentukan keluarga, di mana dari ikatan ini lahirlah tanggung jawab, kasih sayang, serta upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan. Dalam konteks keluarga karir di Kabupaten Sleman, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan legal-formal, melainkan juga sebagai komitmen moral dan spiritual untuk membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai keluarga sakinah. (Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi & Institut, 2024)

Namun, dinamika sosial masyarakat dewasa ini menunjukkan tantangan baru dalam mewujudkan keluarga sakinah. Salah satunya adalah fenomena meningkatnya jumlah keluarga karir, yakni pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di sektor publik maupun privat. Fenomena ini terjadi akibat meningkatnya kebutuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, serta peran ganda perempuan di ruang publik. Di satu sisi, keberadaan keluarga karir berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Namun, di sisi lain, terdapat potensi permasalahan seperti keterbatasan waktu interaksi antara suami, istri, dan anak; pola asuh yang sering dilimpahkan kepada pihak ketiga; serta beban ganda yang dirasakan oleh perempuan (Warsah et al., 2019). Keluarga sakinah merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam yang menggambarkan rumah tangga penuh ketenangan, kasih sayang, dan kebahagiaan. Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang berarti ketentraman atau kedamaian. Dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Ar-Rum ayat 21, dijelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), serta dianugerahi rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Dari sinilah lahir konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Keluarga SAMARA). (Chadijah, 2018) Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan yang membangun rumah tangga. Sakinah berarti ketentraman, ketenangan, dan kedamaian yang lahir dari ikatan suci perkawinan. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, diperlukan kesadaran dan komitmen dari setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, agar mampu menjalankan perannya dengan baik.

Langkah pertama dalam membangun keluarga sakinah adalah menjadikan agama sebagai landasan utama dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri yang berpegang pada ajaran agama akan menjadikan rumah tangga sebagai ladang ibadah, sehingga setiap langkah yang ditempuh senantiasa bernilai kebaikan. Ibadah bersama, saling mengingatkan dalam ketaatan, serta menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak merupakan wujud nyata dari upaya menumbuhkan nilai spiritual di tengah keluarga. Selain itu, komunikasi yang sehat dan terbuka juga menjadi kunci penting. Suami dan istri harus mampu mendengarkan, menghargai, dan memahami satu sama lain. Perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan emosi, sehingga masalah yang muncul justru memperkuat ikatan, bukan meretakkannya. Dengan komunikasi yang baik, setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diterima. Kasih sayang pun harus senantiasa hadir dalam

setiap interaksi. Sikap saling menghormati, saling mendukung, serta memberikan perhatian kecil dalam keseharian akan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam. Anak-anak yang tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang akan merasa aman dan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi kehidupan. Di samping itu, keseimbangan dalam peran dan tanggung jawab juga harus dijaga. Suami berperan sebagai pemimpin keluarga yang penuh tanggung jawab, sementara istri menjadi pendamping yang setia dan pengatur rumah tangga. Anak-anak pun dilibatkan sesuai dengan kemampuannya agar terbentuk rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam keluarga. Tidak kalah penting, pengelolaan ekonomi yang sehat menjadi salah satu penopang terciptanya keluarga sakinah. Dengan hidup sederhana, mengatur keuangan secara bijak, serta mencari rezeki yang halal, keluarga akan lebih mudah mencapai kesejahteraan lahir batin. Akhirnya, keluarga sakinah juga diwujudkan melalui kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Tidak ada keluarga yang luput dari masalah, namun dengan sikap sabar, ikhlas, dan saling menguatkan, setiap rintangan dapat dilalui bersama. Justru dalam ujian itu, cinta dan komitmen akan teruji serta semakin kokoh. (Sajaruddin, 2022) Dengan menjadikan agama sebagai dasar, komunikasi sebagai pengikat, kasih sayang sebagai energi, tanggung jawab sebagai penguat, dan kesabaran sebagai penopang, keluarga sakinah bukan hanya impian, melainkan bisa menjadi kenyataan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Keluarga karir merupakan fenomena yang semakin banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat modern. Istilah ini merujuk pada keluarga di mana suami dan istri sama-sama aktif bekerja atau menekuni profesinya di luar rumah. Kehadiran keluarga karir tidak dapat dilepaskan dari perkembangan zaman, meningkatnya kebutuhan ekonomi, serta dorongan untuk memperoleh aktualisasi diri. Kondisi ini mencerminkan adanya perubahan peran dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab ekonomi tidak lagi sepenuhnya dipikul oleh suami, tetapi juga dibagi bersama oleh istri.

Di satu sisi, keluarga karir membawa banyak manfaat, seperti meningkatnya stabilitas ekonomi, terbukanya kesempatan pengembangan diri, serta terbangunnya nilai kesetaraan dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain, keluarga karir juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait manajemen waktu, komunikasi, serta pembagian peran antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Kesibukan yang padat sering kali mengurangi intensitas kebersamaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan apabila tidak diimbangi dengan sikap saling pengertian.

Meski demikian, banyak keluarga karir yang tetap berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui komunikasi terbuka, manajemen waktu yang baik, serta penguatan nilai spiritual, mereka mampu mewujudkan keluarga yang seimbang antara urusan dunia kerja dan kehidupan rumah tangga. Kehidupan keluarga karir yang tetap mengedepankan kasih sayang, penghormatan, dan kerja sama dapat menjadi teladan bahwa kesibukan karir bukanlah hambatan untuk mencapai keluarga sakinah yang harmonis, tenteram, dan sejahtera. (Kusumaningrum & Sugiasih, 2022)

Fenomena keluarga karir ini juga terlihat jelas di Kabupaten Sleman, khususnya di Kelurahan Caturtunggal, yang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi. Perubahan gaya hidup masyarakat urban, tekanan ekonomi, serta pengaruh lingkungan modern menghadirkan tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, tidak sedikit keluarga karir di Sleman yang tetap mampu mempertahankan konsep keluarga sakinah dengan berpegang pada nilai-nilai agama, keterbukaan, kejujuran, serta sikap saling menghormati. Kehidupan keluarga seperti ini menjadi bukti bahwa kesibukan karir tidak selalu menjadi penghalang dalam membina

rumah tangga yang harmonis apabila ditopang dengan nilai religius yang kuat. Fenomena keluarga karir di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Caturtunggal, Kabupaten Sleman, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi mendorong banyak pasangan untuk sama-sama bekerja, baik di sektor formal maupun informal. Kondisi ini melahirkan pola baru dalam kehidupan keluarga, di mana peran suami dan istri tidak lagi terikat pada pembagian tradisional, melainkan cenderung fleksibel sesuai dengan tuntutan zaman. Di satu sisi, keluarga karir memberikan kontribusi positif, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pendapatan ganda yang diperoleh suami dan istri mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperluas akses pendidikan bagi anak-anak, serta membuka peluang untuk mencapai standar hidup yang lebih baik. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga menunjukkan adanya kemajuan dalam kesetaraan gender, yang sejalan dengan dinamika masyarakat modern.

Namun, di sisi lain, terdapat pula tantangan yang cukup signifikan. Kesibukan kerja kerap mengurangi kualitas waktu bersama keluarga, sehingga berpotensi melemahkan ikatan emosional antaranggota keluarga. Anak-anak bisa merasa kurang mendapat perhatian, sementara suami-istri rentan mengalami konflik akibat kelelahan, stres pekerjaan, atau ketidakseimbangan peran domestik. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga bahkan berujung pada perceraian. Untuk itu, nilai-nilai agama dan budaya lokal masih memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan keluarga karir. Banyak keluarga di Sleman yang tetap mampu menghadirkan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan cara mengedepankan komunikasi terbuka, saling menghargai, serta berbagi peran secara adil. Kehadiran komunitas sosial, tokoh agama, dan lembaga pendidikan juga turut mendukung terciptanya keluarga yang harmonis di tengah tuntutan karir. Lebih jauh, fenomena keluarga karir yang berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga menjadi bukti bahwa modernitas tidak harus mengorbankan nilai-nilai religius dan budaya. Justru, dengan manajemen keluarga yang baik, komitmen spiritual yang kuat, serta kesadaran akan pentingnya keharmonisan, keluarga karir dapat menjadi teladan bagi masyarakat lain dalam mewujudkan rumah tangga yang tangguh menghadapi perubahan zaman. Dalam kondisi ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan keluarga melalui berbagai program. Di Kabupaten Sleman, upaya pemerintah diwujudkan melalui pembinaan keluarga sakinah, penyuluhan perkawinan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan kelembagaan masyarakat melalui majelis taklim, PKK, dan posyandu. Program-program ini bertujuan membekali pasangan suami istri, termasuk keluarga karir, dengan pemahaman dan keterampilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sehat, dan sejahtera (Tuharea et al., 2023)

Kendati demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan tanpa kendala. Masih terdapat keluarga yang menghadapi disharmoni akibat kurangnya komunikasi, beban kerja yang tinggi, serta minimnya pengawasan terhadap anak. Selain itu, faktor eksternal seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan lemahnya solidaritas sosial juga menjadi tantangan bagi terciptanya keluarga sakinah di Sleman. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dapat menjawab tantangan tersebut dan benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan keluarga di Kabupaten Sleman dengan menitikberatkan pada studi kasus konsep keluarga sakinah pada pasangan karir. Penelitian

ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan publik, dinamika keluarga karir, serta nilai-nilai religius masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga yang sejahtera.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis (yuridis-empiris), yang mengkaji efektivitas hukum atau kebijakan di masyarakat. Fokusnya tidak hanya pada norma hukum (kebijakan) itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan, diinterpretasikan, dan dirasakan oleh subjek hukum di lapangan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memberikan pemahaman holistik dan mendalam terhadap fenomena spesifik yang terjadi di lokasi penelitian.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan karir, tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan keluarga. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen kebijakan daerah, literatur akademik, serta referensi pustaka lain yang mendukung kajian. Kombinasi kedua sumber data ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi empiris di lapangan sekaligus memperkuat landasan teoritis penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta strategi pasangan karir dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dokumentasi difokuskan pada kebijakan daerah, program pemerintah, serta laporan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperkaya analisis dengan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi dilakukan dengan menyaring data yang relevan, penyajian data disusun dalam bentuk narasi yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif untuk memahami pola, hubungan, serta implikasi kebijakan pemerintah terhadap keluarga karir.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pasangan karir, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya akurat secara akademis, tetapi juga relevan secara praktis, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga karir dalam membangun keluarga sakinah.

Pembahasan

Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah karena keluarga menjadi unit sosial terkecil yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Sleman telah merumuskan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga, baik melalui aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Dalam konteks pasangan karir, kebijakan ini menjadi sangat relevan mengingat dinamika keluarga karir sering kali menghadirkan tantangan terkait pembagian peran, komunikasi, serta pemeliharaan nilai-nilai keluarga sakinah.

Kebijakan Pemerintah Daerah dan Program Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan hasil dokumentasi, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki beberapa program yang terkait langsung dengan kesejahteraan keluarga. Program tersebut antara lain penyuluhan keluarga sakinah, layanan konseling keluarga, pemberdayaan perempuan, serta program ketahanan keluarga berbasis masyarakat. Program-program ini bertujuan memberikan ruang edukasi sekaligus solusi praktis bagi pasangan, terutama pasangan karir, untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga di tengah kesibukan pekerjaan.

Namun, hasil wawancara dengan informan (Bapak Supardi, Bapak Syahroni, Bapak Sunendi, Bapak Haidir, dan Bapak Juwanto) menunjukkan bahwa meskipun program tersebut ada, tingkat partisipasi pasangan karir masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu karena padatnya aktivitas pekerjaan, sehingga mereka kurang dapat menghadiri kegiatan penyuluhan atau forum keluarga yang diselenggarakan pemerintah daerah. Dengan demikian, meskipun kebijakan sudah cukup komprehensif, pelaksanaannya belum sepenuhnya menyentuh kelompok sasaran, khususnya pasangan karir.

Pemerintah daerah memiliki peran fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Marbun, 2001). Kewenangan ini secara konstitusional diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamatkan otonomi daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merancang program-program yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan sosial. Berbagai kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi panduan strategis bagi seluruh dinas terkait dalam menjalankan programnya (Hadisuprpto, 2012).

Di Kabupaten Sleman, kebijakan tersebut diwujudkan dalam program-program konkret yang diarahkan untuk memperkuat fungsi keluarga. Program ini mencakup pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha, serta penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang mudah diakses. Selain itu, pemerintah daerah juga berfokus pada pembinaan ketahanan keluarga melalui program-program konseling dan edukasi yang dirancang untuk mengatasi tantangan modern, seperti tekanan pekerjaan dan tuntutan sosial (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman, 2023). Intervensi kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah bagi pasangan karir, di mana keharmonisan dan kedamaian dapat terwujud di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Seringkali, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dengan realitas di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana program-program tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh pasangan karir di Sleman, serta sejauh mana program tersebut benar-benar mampu menjawab tantangan spesifik yang mereka hadapi dalam mewujudkan keseimbangan antara kehidupan profesional dan personal. Analisis ini akan memberikan masukan berharga bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa depan (Fathurrahman, 2023).

Tantangan Pasangan Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pasangan karir menghadapi tantangan unik dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah, yang secara harfiah berarti keluarga yang damai, tenang, dan harmonis. Konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara dimensi spiritual, emosional, dan material dalam rumah tangga, sebuah hal yang seringkali sulit dicapai di tengah tuntutan profesional yang tinggi (Fauzi, 2019). Salah satu tantangan utama adalah manajemen waktu dan keseimbangan peran. Keterbatasan waktu akibat jam kerja yang panjang dan komitmen profesional dapat mengikis interaksi berkualitas antar anggota keluarga, yang esensial untuk membangun ikatan emosional yang kuat (Suryanto, 2021). Hal ini seringkali berujung pada kelelahan fisik dan mental, yang secara langsung berdampak pada kualitas komunikasi dan keharmonisan di rumah.

Selain itu, dinamika pembagian peran dalam rumah tangga juga menjadi isu krusial. Pasangan karir modern cenderung mengadopsi pola hubungan yang lebih egaliter, di mana peran domestik tidak lagi dibebankan sepenuhnya pada salah satu pihak. Namun, transisi ini tidak selalu berjalan mulus. Seringkali, ketidaksepakatan atau ketidakadilan dalam pembagian tugas rumah tangga dapat memicu konflik dan ketegangan (Lubis, 2020). Tanpa adanya komunikasi terbuka dan kesepakatan yang jelas, tantangan ini dapat mengganggu stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, keberhasilan pasangan karir dalam mencapai keluarga sakinah sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi, berkomunikasi, dan merancang sistem yang fleksibel untuk mengelola tantangan-tantangan tersebut.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tantangan utama pasangan karir di Sleman meliputi:

- a. Beban ganda, terutama bagi istri yang selain bekerja juga dituntut untuk mengurus rumah tangga.
- b. Waktu interaksi yang terbatas antara suami, istri, dan anak-anak, yang berdampak pada kualitas komunikasi keluarga.
- c. Tekanan pekerjaan yang kadang memengaruhi suasana rumah tangga dan mengurangi keharmonisan.

Meski demikian, sebagian besar informan menegaskan bahwa mereka berusaha menerapkan nilai-nilai keluarga sakinah, seperti saling menghormati, menjaga komunikasi, serta berbagi peran dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam yang menekankan ketenangan, kasih sayang, dan keseimbangan.

Relevansi Kebijakan Pemerintah dengan Konsep Keluarga Sakinah

Kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, memiliki relevansi langsung dengan upaya mewujudkan konsep keluarga sakinah bagi masyarakat, termasuk pasangan karir. Konsep keluarga sakinah, yang berakar pada nilai-nilai keislaman dan universal, tidak hanya menekankan pada aspek spiritual dan emosional, tetapi juga pada kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial keluarga (Anwar, 2018). Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui program-programnya menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuknya keluarga yang damai dan sejahtera. Kebijakan yang relevan mencakup program-program yang memperkuat fungsi keluarga dari berbagai sisi.

Di satu sisi, program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha mikro, secara tidak langsung mendukung aspek kemandirian finansial keluarga sakinah. Ketika keluarga memiliki stabilitas ekonomi, tekanan dan konflik yang seringkali berasal dari masalah finansial dapat diminimalisir, sehingga menciptakan suasana yang lebih tenang dan harmonis di dalam rumah tangga (Laporan BAPPEDA Sleman, 2023). Di sisi lain, kebijakan yang berfokus pada layanan sosial, seperti layanan konseling keluarga, bimbingan pra-nikah, dan program pengasuhan anak, secara langsung menargetkan penguatan ikatan emosional dan kemampuan komunikasi antar anggota keluarga. Program-program ini berfungsi sebagai alat preventif untuk mengatasi potensi konflik dan sebagai solusi konstruktif ketika tantangan muncul (Fitriani, 2020). Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil keluarga dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern.

Konsep keluarga sakinah memiliki dimensi yang tidak hanya material, tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial. Dari sisi kebijakan, program yang dilaksanakan pemerintah daerah pada dasarnya sudah selaras dengan dimensi tersebut. Misalnya, program konseling keluarga mendukung aspek komunikasi dan emosional, program penyuluhan keluarga sakinah mendukung aspek spiritual, sedangkan program pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga mendukung aspek material. Namun, berdasarkan temuan lapangan, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, antara lain:

- a. Sosialisasi yang kurang intensif, sehingga tidak semua keluarga mengetahui keberadaan program.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, misalnya belum adanya pusat layanan keluarga yang mudah diakses di setiap kelurahan.
- c. Minimnya integrasi antar lembaga, sehingga program berjalan sektoral dan kurang berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat normatif dan implementasi di lapangan.

Analisis Kritis terhadap Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pemerintah daerah sering kali tidak berjalan mulus dan menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Analisis kritis menunjukkan adanya gap antara kebijakan normatif dan praktik empiris, di mana regulasi yang tampak ideal di atas kertas belum tentu efektif ketika diterapkan (Anwar, 2018). Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antar instansi. Meskipun berbagai dinas (misalnya, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Koperasi) memiliki program yang relevan, kurangnya sinergi dan koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih program atau bahkan kelangkaan layanan di area tertentu. Hal ini berujung pada inefisiensi dan minimnya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pasangan karier yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengakses berbagai layanan secara terpisah (Lubis, 2020).

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor krusial. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif dari target sasaran. Namun, seringkali kebijakan disusun tanpa melibatkan masukan dari pasangan karier, sehingga program yang ditawarkan tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik mereka. Misalnya,

program pelatihan yang diadakan pada jam kerja sulit diakses oleh pasangan karier, sehingga mengurangi tingkat partisipasi mereka (Suryanto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan adaptif dalam perumusan dan implementasi kebijakan, dengan melibatkan komunitas dan subjek penelitian sejak awal. Analisis kritis ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaannya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjangkau dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari Masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif analisis kebijakan publik, upaya pemerintah daerah Sleman dapat dikategorikan berada pada tahap formulasi dan implementasi kebijakan, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap evaluasi yang komprehensif. Evaluasi kebijakan yang ada masih terbatas pada laporan kegiatan tahunan tanpa kajian mendalam mengenai efektivitas program terhadap kelompok sasaran, khususnya pasangan karir. Selain itu, hasil wawancara mengindikasikan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan penting dalam mendukung konsep keluarga sakinah. Namun, kolaborasi mereka dengan pemerintah daerah masih terbatas. Padahal, pelibatan tokoh masyarakat dapat memperkuat legitimasi program di mata masyarakat sekaligus memperluas jangkauan implementasi kebijakan.

Implikasi bagi Kesejahteraan Keluarga Karir

Implikasi kebijakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan keluarga karier bersifat ganda, mencakup dampak positif dan tantangan yang masih perlu diatasi. Di satu sisi, program-program pemerintah dapat memberikan dukungan esensial yang sangat dibutuhkan. Misalnya, kebijakan yang memfasilitasi akses terhadap layanan penitipan anak (daycare) berkualitas dan terjangkau dapat secara signifikan mengurangi beban pasangan karier, memungkinkan mereka untuk fokus pada pekerjaan tanpa mengorbankan kualitas pengasuhan anak (Suryanto, 2021). Bantuan finansial dan pelatihan ekonomi juga berdampak langsung pada stabilitas keluarga, mengurangi stres akibat tekanan finansial dan menciptakan landasan yang lebih kuat untuk keharmonisan (Anwar, 2018).

Terdapat implikasi yang kurang optimal akibat ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dan realitas yang dihadapi pasangan karier. Seringkali, program yang dirancang tidak mempertimbangkan jadwal yang padat atau kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, lokakarya atau seminar keluarga yang diadakan pada jam kerja sulit dihadiri oleh pasangan karier, sehingga manfaatnya tidak dapat dirasakan secara maksimal (Lubis, 2020). Hal ini menimbulkan implikasi bahwa meskipun niat pemerintah baik, efektivitasnya terbatas jika kebijakan tidak dirancang dengan pemahaman mendalam mengenai gaya hidup target sasaran. Oleh karena itu, agar kebijakan memiliki implikasi positif yang lebih kuat, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, termasuk penyediaan layanan daring atau program yang dapat diakses di luar jam kerja, untuk benar-benar mendukung kesejahteraan keluarga karier.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah Sleman telah berkontribusi positif dalam memberikan dasar normatif dan programatik untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Namun, agar lebih efektif bagi pasangan karier, diperlukan:

- a. Penguatan sosialisasi dengan memanfaatkan media digital agar program lebih mudah diakses oleh keluarga sibuk.
- b. Peningkatan layanan berbasis komunitas, misalnya pusat layanan keluarga di tingkat kelurahan yang fleksibel waktu pelayanannya.

- c. Kolaborasi multi pihak antara pemerintah, tokoh agama, lembaga masyarakat, dan dunia kerja untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keluarga sakinah.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman sudah berada pada jalur yang tepat, tetapi masih memerlukan optimalisasi agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata pasangan karir dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sejahtera.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sleman, khususnya di Kelurahan Caturtunggal, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program, seperti penyuluhan keluarga sakinah, layanan konseling, pemberdayaan perempuan, dan program ketahanan keluarga. Arah kebijakan tersebut pada dasarnya sudah selaras dengan konsep keluarga sakinah yang menekankan keseimbangan antara aspek material, emosional, spiritual, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, pemerintah daerah sudah menunjukkan kepedulian dan komitmen dalam mengintegrasikan nilai-nilai religius sekaligus kebutuhan praktis keluarga modern ke dalam kebijakan pembangunan keluarga.

Namun, pada tataran implementasi, kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sosialisasi program, rendahnya partisipasi pasangan karir akibat kesibukan dan keterbatasan waktu, serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Akibatnya, efektivitas program belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh keluarga karir, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga belum maksimal. Hal ini menegaskan adanya jarak antara perumusan kebijakan yang ideal dengan kondisi lapangan yang kompleks.

Meskipun demikian, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pasangan karir tetap memiliki daya tahan (resiliensi) dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka berusaha menerapkan nilai-nilai keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dengan menjaga komunikasi, saling menghormati, berbagi peran domestik, serta menguatkan nilai religius meski dalam keterbatasan waktu. Fenomena ini membuktikan bahwa keluarga sakinah tetap dapat diwujudkan di tengah tuntutan karir yang padat, asalkan terdapat komitmen, kedewasaan emosional, dan kesadaran akan pentingnya keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman sudah memiliki arah yang positif, tetapi keberhasilan program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada optimalisasi implementasi. Diperlukan strategi yang lebih adaptif terhadap realitas pasangan karir, seperti penyuluhan berbasis daring, konseling fleksibel, pemberdayaan komunitas lokal, serta kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak swasta.

Secara lebih luas, penelitian ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan publik dan inisiatif keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kebijakan pemerintah daerah menjadi kerangka pendukung, sedangkan pasangan karir berperan sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan rumah tangga. Jika kedua aspek ini dapat berjalan secara harmonis, maka konsep keluarga sakinah bukan hanya menjadi ideal normatif, melainkan realitas yang dapat dicapai dan dirasakan oleh masyarakat di Sleman, serta menjadi model inspiratif bagi daerah lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anwar, A. 2018. *Sosiologi Keluarga dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Chadijah, S. 2018. Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikir: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 113–129. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina. 2021. *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat didalam Sistem Hukum Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974*. 1, 72–94. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr985mgNRFowXgAI89XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1747167905/RO=10/RU=htps%3A%2F%2Fjurnal.uns.ac.id%2FJoLSIC%2Farticle%2Fdownload%2F50254%2Fpdf/RK=2/RS=TiqBD0cA11YLmNdmZPrQucBXAQk-
- Fauzi, R. 2019. *Psikologi Keluarga dalam Perspektif Modern*. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, S. 2020. *Hukum Keluarga dan Dinamika Rumah Tangga*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fatimaningsih, E. (n.d.). *Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak*. 17(2), 103–110.
- Hadisuprpto, P. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah: Otonomi dan Desentralisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kawengian, S., Tucunan, A. A., Korompis, G. E., Kesehatan Masyarakat, F., & Sam Ratulangi ABSTRAK, U. 2022. Penerapan Fungsi Keluarga Di Sulawesi Utara. *Jurnal KESMAS*, 11(2), 57–71.
- Kusumaningrum, S. H., & Sugiasih, I. 2022. Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Kematangan Karir Di SMA Negeri 1 Purwodadi. *Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 1(1), 234–242.
- Laporan BAPPEDA Sleman. 2023.s
- Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman. 2023.
- Lubis, S. 2020. *Dinamika Peran Gender dalam Rumah Tangga Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Marbun, B. N. 2001. *Dinamika Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sleman*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maimun, M. 2022. Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizān*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, M. A. R., & Institut. 2024. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>
- Musyafah, A. A. 2022. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Credito*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Riyono, B. 2022. Keluarga sebagai Fondasi Peradaban Bangsa: Sebuah Strategi Memanfaatkan Bonus Demografi secara Optimal. *Buletin Psikologi*, 30(1), 59. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.68234>
- Sajaruddin. 2022. Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Tana Mana*,

3(2), 126.

Suryanto, A. 2021. *Manajemen Stres dan Keseimbangan Hidup bagi Pekerja Profesional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tuharea, J., Metekohy, L. M., & Maatoke, S. 2023. Peran Pemerintah Menciptakan Desa Keluarga Berencana (KB) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Wasia Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat). *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 108–113. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.67>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Warsah, I., Masduki, Y., Imron, Daheri, M., & Morganna, R. 2019. Muslim minority in Yogyakarta: Between social relationship and religious motivation. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(2), 367–398. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>